

a. Visi

Menjadi program studi Magister Oseanografi yang unggul dan inovatif di bidang survei dan pemetaan hidro-oseanografi sesuai perkembangan IPTEK untuk mendukung kebutuhan militer dan non-militer berdasarkan Tujuh Pilar Poros Maritim Dunia

KRITERIA VISI	PENJELASAN
<p>Unggul</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unggul dalam penerapan berbagai disiplin ilmu yang terkoneksi dan terintegrasi secara berkelanjutan yaitu ilmu dasar (matematika, Fisika, dan geografi), Ilmu kebumihan (geodesi, Oseanografi, dan Meteorologi, kartografi), dan ilmu Aplikasi (survey dan pemetaan, komputer, citra satelit, Pemrograman Data Spasial, Penentuan Bawah Wilayah, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut) untuk pengembangan IPTEK oseanografi taktis 2. Unggul dalam pengembangan IPTEK pada Program Studi Magister Oseanografi yaitu melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang oseanografi taktis pada kegiatan perencanaan pembuatan Basis Data Kelautan, pelaksanaan survei oseanografi, pengolahan data spasial oseanografi, Analisa data spasial kelautan, interpretasi data spasial kelautan, penyajian data spasial kelautan dan manajemen data spasial kelautan dalam suatu Infrastruktur Data Spasial Kelautan (IDSK). 3. Unggul dalam penerapan ilmu oseanografi taktis baik untuk kepentingan militer ataupun non-militer dalam pembangunan maritim.
<p>Inovatif</p>	<p>Terjadi proses pembaharuan dan penemuan baru dalam pengembangan IPTEK di bidang oseanografi terkait kedinamikaan karakter perairan laut baik horizontal atau vertikal dengan memanfaatkan teknologi gelombang akustik bawah air, teknologi computer, teknologi informasi, teknologi satelit dalam mencakup wilayah lokal, regional dan global.</p>
<p>Tujuh Pilar Poros Maritim Dunia</p>	<p>Bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, Tujuh Pilar Poros Maritim Dunia merupakan suatu kebijakan terkait kelautan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim bagi dunia. 7 (tujuh) pilar tersebut membutuhkan data dan informasi oseanografi taktis. Ketujuh pilar tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan penguasaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan serta mengembangkan SDM di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdidikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional.

KRITERIA VISI	PENJELASAN
	<p>2. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut, kebijakan pertahanan, keamanan, penegak hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, dan hambatan, dan gangguan di wilayah tersebut. Beberapa program yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan ini meliputi: 1) Pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri; 2) Menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi; 3) Optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelejen, serta pengawasan dan pengintaian; dan lain-lain.</p> <p>3. Tata Kelola dan Kelembagaan Kelautan, kebijakan ini dibuat untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif terintegrasi, efektif, dan efisien. Program-program dalam pelaksanaannya meliputi: a. Penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan; b. Implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional; dan b. Pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab.</p> <p>4. Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan, Pertama, kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi. Artinya, pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara menggerakkan sumber daya nasional melalui program kelautan nasional dan disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan ekonomi kelautan. Kedua, kebijakan infrastruktur dilakukan pemerintah dalam rangka membangun dan mengembangkan infrastruktur kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan konektivitas dan pembangunan dengan pendekatan Indosentris. Ketiga, kebijakan peningkatan kesejahteraan memiliki tujuan dalam mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, kebijakan pengelolaan laut dibuat untuk melindungi sumber daya dan lingkungan berdasarkan pada sumber daya dukung lingkungan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional. Sedangkan kebijakan perlindungan lingkungan laut dibuat untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya kerusakan pada ekosistem di laut.</p>

KRITERIA VISI	PENJELASAN
	<p>6. Budaya Bahari, budaya bahari bertujuan guna memberi pemahaman yang menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari. Beberapa program utamanya yaitu: 1) Meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; 2) Mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional; 3) Melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari; dan lain-lain.</p> <p>7. Diplomasi Maritim, diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Beberapa program utama dalam pelaksanaan diplomasi maritim meliputi a. Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral; b. Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dunia di bidang kelautan; c. Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan; dan lain-lain.</p>
<p>Kebutuhan militer dan non-militer</p>	<p>Program Studi Magister oseanografi mampu berkontribusi kepentingan militer dan kepentingan umum (nasional dan daerah), hal tersebut karena data dan informasi oseanografi sangat dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Pembahasan Kebutuhan militer dan non-militer adalah membahas kebutuhan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kebutuhan OMP antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) lintas laut militer, (2) pendaratan amfibi, (3) peperangan ranjau, (4) pertahanan pantai, (5) kapal selam dll. <p>Sedangkan untuk OMSP antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) mengatasi gerakan separatis bersenjata; (2) mengatasi pemberontakan bersenjata; (3) mengatasi aksi terorisme; (4) mengamankan wilayah perbatasan; (5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; (6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; (7) mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; (8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; (9) membantu tugas pemerintahan di daerah;

KRITERIA VISI	PENJELASAN
	(10) membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang; (11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; (12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (<i>search and rescue</i>); serta (14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

b) Misi Prodi Magister Oseanografi STTAL adalah:

1. Peserta didik dapat memahami tentang dinamika atmosfer dan oseanografi dan mengintegrasikan parameter lautan & atmosfer di kawasan perairan Indonesia yang berimplikasi terhadap dampak kondisi kawasan ini untuk operasi dan sistem militer maupun selain perang dengan mampu mengamati, mengasimilasi, menganalisis, dan memprediksi kondisi perairan laut dan pesisir, serta kondisi atmosfer dengan menggunakan teknik observasi penginderaan langsung dan jarak jauh, analisis statistik, dan model numerik.
2. Peserta didik dapat melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi sistem prediksi numerik dalam bidang oseanografi baik untuk kepentingan militer dan survei kelautan, sehingga mampu dalam pemahaman yang luas tentang sistem pemodelan untuk memasukkan kekuatan, kelemahan, dan kerentanan; keadaan model dan teknik saat ini; dan aplikasi yang tepat dari teknik deterministik dan stokastik pada kondisi OMP dan OMSP.
3. Peserta didik mampu menjadi pemecah masalah Laut/Atmosfer sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan melakukan analisis untuk memecahkan masalah lingkungan yang menantang di bidang Oseanografi Fisik dan/atau Meteorologi sebagaimana diterapkan pada operasi Angkatan Laut/Gabungan dengan menggunakan teknik penelitian ilmiah modern, pengalaman lapangan, peralatan dan perlengkapan yang nantinya dapat mendorong terciptanya keunggulan dalam pengambilan kebijakan ataupun strategi menggunakan teori keputusan yang masuk akal, dengan mempertimbangkan tindakan yang tersedia, penilaian kerentanan, ketidakpastian, dan risiko sehingga dapat mewujudkan keberhasilan dalam OMP dan OMSP di perairan Indonesia

c. Tujuan

Menjadi program studi dan pusat pengembangan keilmuan dalam mendukung pertahanan bawah laut dan survei untuk memenuhi kebutuhan pertahanan militer (pertahanan laut) dan keselamatan navigasi, dikarenakan masih belum adanya program pendidikan bidang oseanografi yang spesifik dan aplikatif untuk mengkombinasikan bidang dinamika kelautan (oseanografi) dan pertahanan yang tepat guna sehingga dapat diimplementasikan untuk menghasilkan inovasi yang menitik beratkan pada penangkal ancaman menggunakan jalur laut.

d. Motto

House of Hydro-Oceanography Knowledge

